

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI
TAHUN 2024**



**JALAN RAYA PEMDA NO. 39 CIBINONG
TELEPON (021) 8760600; FAXSIMILE (021) 8756362, 87915615**

CIBINONG, 31 JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak hidayah dan karunia kepada kita semua. Suatu kebahagiaan bagi KPP Pratama Cileungsi dapat melaporkan ringkasan kinerjanya selama setahun kepada para pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 ini, walaupun kami sadar laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan laporan di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi KPP Pratama Cileungsi dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja KPP Pratama Cileungsi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cibinong, 31 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Budi Suroso



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
C. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	9
B. Realisasi Anggaran	13
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	23
BAB IV PENUTUP.....	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Nilai Kinerja Organisasi	



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-112/PJ./2007 tanggal 9 Agustus 2007, terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cileungsi dengan wilayah kerja meliputi tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Citeureup, Cariu, Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, dan Tanjungsari.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian dari program Modernisasi Administrasi Perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kepatuhan WP melalui pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi, serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Cileungsi sampai dengan 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

No.	JENIS WP	CABANG	PUSAT	Grand Total
1	BADAN	1.707	11.446	13.153
2	OP	1.528	256.836	258.364
3	PEMUNGUT		302	302
	Grand Total	3.235	268.584	271.819

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi tahun anggaran 2023.



Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Cileungsi yaitu pertama adalah penyetoran besar yang tidak terulang di tahun 2023 terkait dengan proyek strategis Nasional.

Permasalahan utama yang kedua yaitu menurunnya penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pengusaha Real Estate yang disebabkan karena sisa unit rumah yang berkurang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Pratama Cileungsi

KPP Pratama Cileungsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi PPh, PPN dan Pajak Tidak Langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Cileungsi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

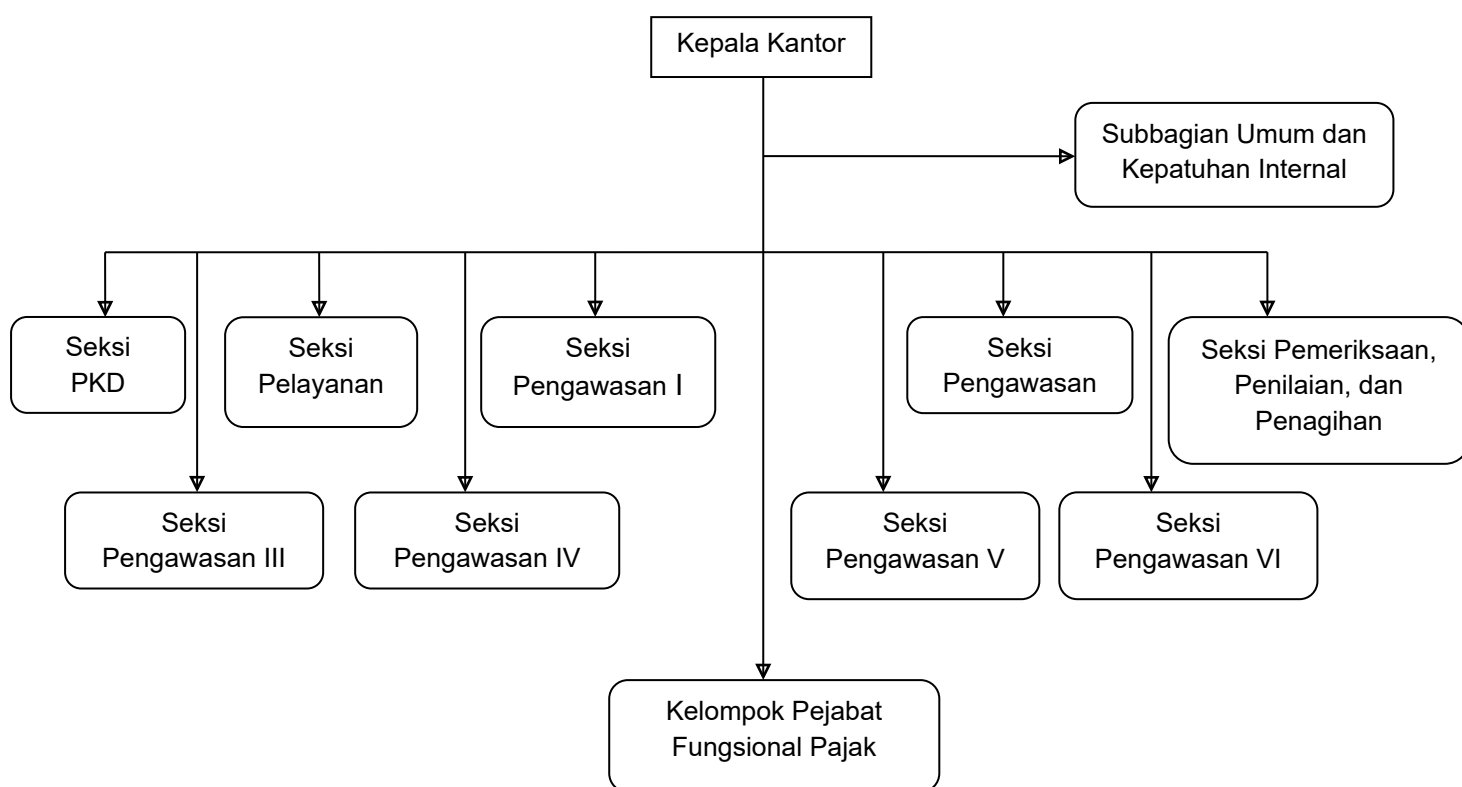
1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi WP;
2. Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas WP;
3. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
4. Penatusahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
5. Pemeriksaan seluruh jenis pajak;
6. Penerbitan surat ketetapan pajak;
7. Pembetulan surat ketetapan pajak;
8. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan; dan
9. Pelaksanaan administrasi KPP.

Dalam melaksanakan amanat (mandat) tersebut, KPP Pratama Cileungsi melaksanakan peran strategis yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan dibidang perpajakan yang ada dalam wilayah wewenangnyanya.

KPP Pratama Cileungsi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Penjamin Kualitas Data
3. Seksi Pelayanan
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
5. Seksi Pengawasan I
6. Seksi Pengawasan II
7. Seksi Pengawasan III
8. Seksi Pengawasan IV
9. Seksi Pengawasan V
10. Seksi Pengawasan VI
11. Kelompok Fungsional Pemeriksaa

Bagan 1
Struktur Organisasi KPP Pratama Cileungsi



C. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan perihal organisasi, Latar Belakang, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi pada KPP Pratama Cileungsi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar dari Perencanaan Strategis yang menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 serta menguraikan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi pada tahun 2024, Kinerja Lain-Lain *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN, Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang dilakukan KPP Pratama Cileungsi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPP Pratama Cileungsi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPP Pratama Cileungsi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak (Renstra DJP) merupakan *roadmap* yang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran DJP, serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Rencana strategis KPP Pratama Cileungsi merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan KPP Pratama Cileungsi yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi, dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan



- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020-2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja KPP Pratama Cileungsi untuk tahun 2024 beserta Adendum atas Perjanjian Kinerja tersebut dengan Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Cileungsi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Rp 1.086.648.000

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara

Rp 502.191.000

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi

Rp 197.576.000

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Rp 386.881.000

B. Program Dukungan Manajemen

Rp 4.527.627.000

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Rp 3.674.901.000

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Rp 852.726.000

Total

Rp 5.614.275.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III,



Ditandatangani Secara Elektronik
Romadhaniah

Cibinong, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Cileungsi,



Ditandatangani Secara Elektronik
Anita Widiati

Tabel II.1
Adendum Sasaran Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Cileungsi

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI															
NOMOR : PK-8A/WPJ.33/2024															
Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-8/WPJ.33/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut: A. Perubahan target dan <i>trajectory</i> Indikator Kinerja Utama:															
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	-	-	-	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)	85 skala (100)

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III,



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
NIP 19671212 199503 2 001

Cibinong, 23 September 2024
Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi,



Ditandatangani secara elektronik
Anita Widiati
NIP 19661013 199201 2 001

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI															
Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut: 1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai															
No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Anita Widiati
NIP 19661013 199201 2 001

Cibinong, 23 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Romadhaniah
NIP 19671212 199503 2 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi adalah bentuk perwujudan dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan capaian kinerja adalah bentuk pencapaian atas pelaksanaan suatu kegiatan atau target yang telah diwujudkan dalam bentuk sasaran strategis yang diperinci dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel III.1
Capaian Kinerja Tahun 2024



Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	103,25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103,25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,22%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,22
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	107,38	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,38
Customer Perspective							20,00%	101,75
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,41
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,16%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,16
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,49%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,49
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,08
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,08%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,08
Internal Process Perspective							25,00%	116,26
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,73
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,46%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,46
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,04%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,06
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	115,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	115,15
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,93%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,93
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,15
7	Penegakan hukum yang efektif							112,64
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,79%	Max	P/M	14,00%	26,92%	119,79
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	113,02%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	72,17%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,73
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,45
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,14
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,44	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,46
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,80	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,78
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,58

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

a. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	24%	50%	50%	76%	76%	100%	100%
Realisasi	21,50%	50,56%	50,56%	72,54%	72,54%	100,22%	100,22%
Capaian (Max 120)	89,58%	101,12%	101,12%	95,45%	95,45%	100,22%	100,22%

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Cileungsi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan



Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

IKU

(Dalam rupiah)

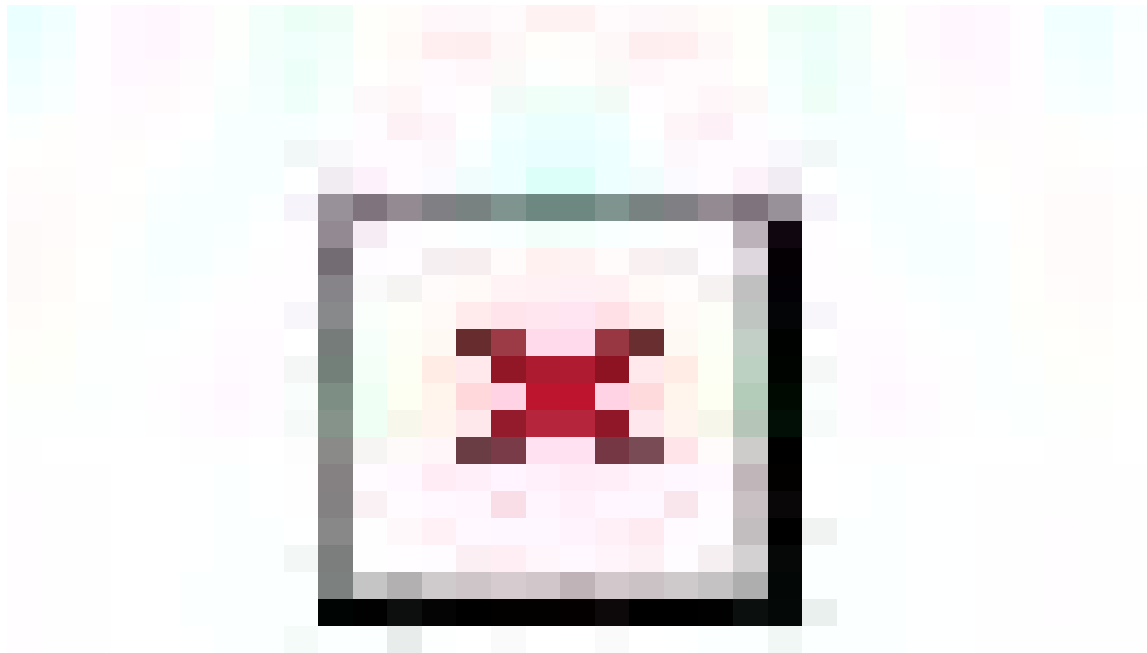
Jenis Pajak	Rencana Tahun 2024	Penerimaan Tahun 2023	Penerimaan Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	% Tumbuh Tahun 2023 - 2024	% Kontribusi Tahun 2024
PPh Non MIGAS	849,446,694,000	738,773,204,274	850,188,289,083	12,61%	100.09	12,61%
PPN dan PPnBM	449,563,323,000	426,747,365,923	449,583,753,421	4,77%	100.00	4,77%
PBB dan BPHTB	20,458,695,000	22,329,664,599	22,630,914,935	1,33%	110.62	1,33%
Pendapatan PPh DTP	0.00	2,886,547,812	1,267,398,689	28,91%	100.00	28,91%
Pajak Lainnya	1,267,398,000	900,958,000	1,267,398,689	28,91%	100.00	28,91%



Total	1,320,736,110,000	1,197,237,050,108	1,323,670,356,128	9,55%	100.22	9,55%

Sumber : Beranda Penerimaan pada Aplikasi Approweb, data tanggal 24 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.323,670 Triliun dengan capaian sebesar 100,22% dari target Perpres 76/2023 sebesar Rp1.320,736 Triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 10,56%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 11,88%.



Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Mayoritas jenis pajak bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan nilai Rp.597,59 triliun (growth 24,26%), diikuti PPN Dalam Negeri senilai Rp425,37 triliun (growth 8,68%), dan PPh Final sebesar Rp208,02 triliun (growth 10,42%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp.597,59 triliun (growth 24,26%), diikuti PPh Final sebesar Rp208,02 triliun (growth 10,42%), dan PPh Pasal 22 sebesar Rp15,27 triliun. (growth 10,59%).

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	88,02%	93,25%	124,51%	103,83%	100,22%
---------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------

Sumber: *Kinerja Penerimaan Aplikasi Portal DJP tanggal 30 Januari 2025.*

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai target, namun sedikit menurun dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pengusaha Real Estate yang disebabkan karena sisa unit rumah yang akan dijual semakin berkurang.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Pearencaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,22%

Sumber :

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,22%

Sumber : *Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Cileungsi Tahun 2024.*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan terbesar KPP Pratama Cileungsi pada tahun 2024 ini didominasi dari PPh Pasal 21, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Besar KPP Pratama Cileungsi pada umumnya adalah Wajib Pajak Cabang. Kemudian penerimaan terbesar berikutnya berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 22.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Mengawasi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran masa;
2. Menindaklanjuti DPP s.d. Triwulan II;



3. Menerbitkan SP2DK;
4. Menindaklanjuti SP2DK dengan melakukan pengawasan secara langsung maupun online melalui *Whats App* (WA), Telepon, *Email* terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan;
5. Menerbitkan STP, menindaklanjuti DSPE (Pengawasan Pembayaran Masa);
6. Melakukan Suspend Wajib Pajak PKP yang secara berturut-turut tidak melaporkan PPN Masa;
7. Pengumpulan data Wajib Pajak secara lapangan (KPDL);
8. Melaksanakan visit secara selektif terhadap Wajib Pajak yang mengalami penurunan pembayaran masa;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kab. Bogor terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan APBDes;
10. Melakukan Manajemen Restitusi;
11. Sinergi antara *Account Representative* (AR) dan Fungsional Pemeriksa Pajakuntuk (FPP) melakukan bedah Wajib Pajak;
12. Melakukan Visit dan konseling Wajib Pajak;
13. Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak patuh;
14. Meneliti dan menindaklanjuti data penguji;
15. Tindak lanjut data faktur pajak yang belum dilaporkan;
16. Meminta bantuan penilaian untuk penggalan potensi Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
17. Melaksanakan aktivitas WRA;
18. Melaksanakan pemeriksaan Data Konkret;
19. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) selain tahun berjalan;
20. Melaksanakan edukasi pada Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan selain tahun berjalan;
21. Mengoptimalkan tindakan penagihan khususnya pemblokiran dan penyitaan serta lelang; dan
22. Melakukan percepatan pemeriksaan.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak
Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 1. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Cileungsi yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 2. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif;
 3. Melakukan kegiatan Visit dan konseling kepada Wajib Pajak; dan
 4. Melakukan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana yang telah disebut diatas.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
 1. Semakin berkurangnya sisa unit rumah yang akan dijual Pengusaha Real Estate sehingga menyebabkan menurunnya penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.



2.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan pada KPP Pratama Cileungsi dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di tahun 2024;
- b. Menjaga dan mengawasi penerimaan sampai dengan akhir tahun dari Wajib Pajak yang memiliki potensi penerimaan besar;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- d. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per KPP Pratama Cileungsi dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan; dan
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak; dan



- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut; dan
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Mempertahankan Kinerja Penerimaan KPP Cileungsi dengan cara

1. Menjalankan strategi penerimaan tahun 2024 yang telah disusun oleh Komite Kepatuhan KPP Pratama Cileungsi yang meliputi :
 - DPP
 - DSPE
 - DSPC



- DSPT

2. Mengusulkan DSPP dan DSPN
3. Melakukan pengawasan Pelaporan dan Pembayaran Masa (Penerbitan STP, Penambahan WP, dan Tindak Lanjut Data matching)
4. Mengawasi 1500 WP penentu penerimaan
5. Menindaklanjuti SP2DK dengan melakukan pengawasan secara online melalui WA, Telepon, Email terhadap wajib pajak yang belum melapor
6. Pengawasan SP2DK outstanding
7. Optimalisasi pemanfaatan data internal dan data lainnya
8. Menerbitkan STP
9. Mengoptimalkan tindakan WRA
10. Meminta bantuan penilaian untuk penggalian potensi KMS
11. Melaksanakan pemeriksaan Data Konkret
12. Melakukan Visit dan konseling WP
13. Pengawasan PKP yang tidak patuh
14. meneliti dan menindaklanjuti data pemicu dan penguji
15. Mengajukan usulan Bukper
16. Melaksanakan kolaborasi dengan penyidik kanwilMelakukan penilaian aset sita
17. Melaksanakan edukasi pada WP atas kewajiban perpajakan selain tahun berjalan
18. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan khususnya pemeriksaan khusus, serta membuat KKA sebagai bahan baku pemeriksaanmengoptimalkan tindakan penagihan aktif berupa Sita, Blokir dan Lelang

b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100,00	105	105	103,6	103,6	107,4	107,4
Capaian (Max 120)	100%	105,00%	105,00%	103,60%	103,60%	107,38%	107,38%

Sumber : Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Cileungsi Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**



Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. *Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto;*

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. *Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.*

- Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

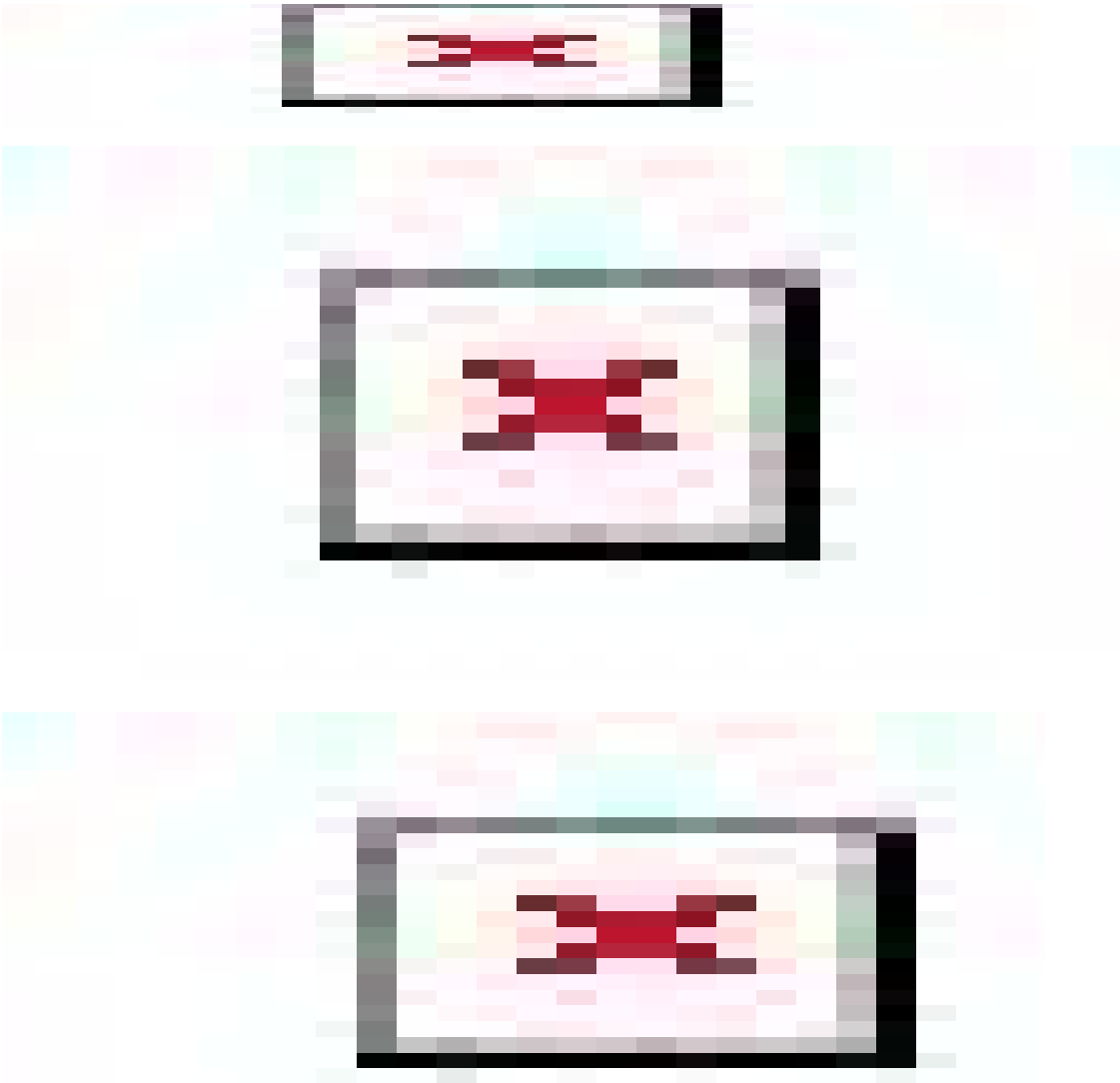
- Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• **Formula IKU**



IKU

(Dalam rupiah)

Sumber : Beranda Penerimaan pada Aplikasi Approweb, data tanggal 24 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.323,670 Triliun dengan capaian sebesar 100,22% dari target Perpres 76/2023 sebesar Rp1.320,736 Triliun. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 10,56%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 11,88%.

Mayoritas jenis pajak tumbuh positif pada periode ini. Mayoritas jenis pajak bertumbuh positif, dengan kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 21 dengan nilai Rp.597,59 triliun (growth 24,26%), diikuti PPN Dalam Negeri senilai Rp425,37 triliun (growth 8,68%), dan PPh Final sebesar Rp208,02 triliun (growth 10,42%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 21 yang mencatatkan realisasi sebesar Rp.597,59 triliun (growth 24,26%), diikuti PPh Final sebesar Rp208,02 triliun (growth 10,42%), dan PPh Pasal 22 sebesar Rp15,27 triliun. (growth 10,59%).

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	88,02%	93,25%	124,51%	103,83%	100,22%

Sumber: *Kinerja Penerimaan Aplikasi Portal DJP tanggal 30 Januari 2025.*

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai target, namun sedikit menurun dibandingkan realisasi pada dua tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan menurunnya penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pengusaha Real Estate yang disebabkan karena sisa unit rumah yang akan dijual semakin berkurang.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Pearencaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,22%

Sumber :

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,22%



Sumber : *Laporan Penjelasan Progress IKU KPP Pratama Cileungsi Tahun 2024.*

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan terbesar KPP Pratama Cileungsi pada tahun 2024 ini didominasi dari PPh Pasal 21, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak Besar KPP Pratama Cileungsi pada umumnya adalah Wajib Pajak Cabang. Kemudian penerimaan terbesar berikutnya berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPh Pasal 22.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain:

1. Mengawasi Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran masa;
2. Menindaklanjuti DPP s.d. Triwulan II;
3. Menerbitkan SP2DK;
4. Menindaklanjuti SP2DK dengan melakukan pengawasan secara langsung maupun online melalui *Whats App* (WA), Telepon, *Email* terhadap Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan;
5. Menerbitkan STP, menindaklanjuti DSPE (Pengawasan Pembayaran Masa);
6. Melakukan Suspend Wajib Pajak PKP yang secara berturut-turut tidak melaporkan PPN Masa;
7. Pengumpulan data Wajib Pajak secara lapangan (KPDL);
8. Melaksanakan visit secara selektif terhadap Wajib Pajak yang mengalami penurunan pembayaran masa;
9. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kab. Bogor terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan APBDes;
10. Melakukan Manajemen Restitusi;
11. Sinergi antara *Account Representative* (AR) dan Fungsional Pemeriksa Pajakuntuk (FPP) melakukan bedah Wajib Pajak;
12. Melakukan Visit dan konseling Wajib Pajak;
13. Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak patuh;
14. Meneliti dan menindaklanjuti data penguji;
15. Tindak lanjut data faktur pajak yang belum dilaporkan;
16. Meminta bantuan penilaian untuk penggalan potensi Kegiatan Membangun Sendiri (KMS);
17. Melaksanakan aktivitas WRA;
18. Melaksanakan pemeriksaan Data Konkret;
19. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) selain tahun berjalan;
20. Melaksanakan edukasi pada Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan selain tahun berjalan;
21. Mengoptimalkan tindakan penagihan khususnya pemblokiran dan penyitaan serta lelang; dan
22. Melakukan percepatan pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak



Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:

1. Pengawasan Wajib Pajak oleh segenap pegawai KPP Pratama Cileungsi yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
2. Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif;
3. Melakukan kegiatan Visit dan konseling kepada Wajib Pajak; dan
4. Melakukan tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana yang telah disebut diatas.

b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak

1. Semakin berkurangnya sisa unit rumah yang akan dijual Pengusaha Real Estate sehingga menyebabkan menurunnya penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 2.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- a. Optimalisasi perencanaan penerimaan pada KPP Pratama Cileungsi dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di tahun 2024;
- b. Menjaga dan mengawasi penerimaan sampai dengan akhir tahun dari Wajib Pajak yang memiliki potensi penerimaan besar;
- c. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- d. *Monitoring* realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per KPP Pratama Cileungsi dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah;



- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan; dan
 - d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas;
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak; dan
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut; dan
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process).
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
 Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
 Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender; dan
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

Mempertahankan Kinerja Penerimaan KPP Cileungsi dengan cara

1. Menjalankan strategi penerimaan tahun 2024 yang telah disusun oleh Komite Kepatuhan KPP Pratama Cileungsi yang meliputi :
 - DPP
 - DSPE
 - DSPC
 - DSPT
2. Mengusulkan DSPP dan DSPN
3. Melakukan pengawasan Pelaporan dan Pembayaran Masa (Penerbitan STP, Penambahan WP, dan Tindak Lanjut Data matching)
4. Mengawasi 1500 WP penentu penerimaan
5. Menindaklanjuti SP2DK dengan melakukan pengawasan secara online melalui WA, Telepon, Email terhadap wajib pajak yang belum melapor
6. Pengawasan SP2DK outstanding
7. Optimalisasi pemanfaatan data internal dan data lainnya
8. Menerbitkan STP
9. Mengoptimalkan tindakan WRA
10. Meminta bantuan penilaian untuk penggalan potensi KMS
11. Melaksanakan pemeriksaan Data Konkret
12. Melakukan Visit dan konseling WP
13. Pengawasan PKP yang tidak patuh
14. meneliti dan menindaklanjuti data pemicu dan penguji
15. Mengajukan usulan Bukper
16. Melaksanakan kolaborasi dengan penyidik kanwilMelakukan penilaian aset sita
17. Melaksanakan edukasi pada WP atas kewajiban perpajakan selain tahun berjalan
18. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan khususnya pemeriksaan khusus, serta membuat KKA sebagai bahan baku pemeriksaanmengoptimalkan tindakan penagihan aktif berupa Sita, Blokir dan Lelang

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- a. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

B. REALISASI ANGGARAN

Segala kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari DIPA. Adapun alokasi dan realisasi kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi selama tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.1
Tabel Rencana dan Realisasi Anggaran KPP Pratama Cileungsi
Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
I	Belanja gaji	825,737,000	816,746,000	98.91%



II	Belanja barang dan modal	4,801,767,000	4,472,076,382	93.13%
Jumlah I + II		5,627,504,000	5,288,822,382	93.98%

Dari tabel di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan KPP Pratama Cileungsi untuk belanja gaji sebesar 98.91% dan penyerapan untuk kegiatan belanja barang dan modal 93.13%. Sehingga persentase penyerapan total KPP Pratama Cileungsi berkisar antara 93.98%. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang telah optimal yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

D. KINERJA LAIN-LAIN

E. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi tahun anggaran 2023.

Sebagai instansi yang telah menerapkan sistem administrasi modern tentu tidak terlepas dari masalah dan kendala dalam pencapaian rencana penerimaan yang ditargetkan. Masalah utama yang dihadapi oleh KPP Pratama Cileungsi dalam mencapai target penerimaan yang ditetapkan adalah minimnya jumlah SDM yang produktif serta memiliki *hard skill* dan *soft skill* yang mumpuni, terutama pada tingkat pelaksana. Masalah tersebut akan berusaha di atasi antara lain dengan cara mengadakan kegiatan *in house training* dan *internalisasi corporate value* secara berkesinambungan, monitoring dan evaluasi kinerja dari atasan, pemberian contoh dan teladan yang baik dari pimpinan, serta penjatuhan hukuman kepada pegawai-pegawai yang bersikap indisipliner.



Selain itu, kendala yang kerap dihadapi adalah masalah kondisi geografis wilayah KPP Pratama Cileungsi yang cakupannya luas dan kondisi medannya agak sulit. Hal tersebut membuat Wajib Pajak sulit mendapatkan akses pelayanan perpajakan karena kondisi wilayah kerja jauh dari lokasi KPP.

Strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang adalah dengan membuat rencana kerja berupa meningkatkan visit/kunjungan ke Wajib Pajak dengan membawa data dan analisis permasalahan, meningkatkan jumlah surat himbauan, meningkatkan jumlah pemebetulan SPT Tahunan, pembuatan Nota Perhitungan STP dan penggalan potensi serta meningkatkan sosialisasi ke wajib pajak dalam rangka meningkat pengetahuan atas perpajakan atau pengenalan atas peraturan-peraturan baru kepada wajib pajak. Untuk Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) dengan meningkatkan kegiatan penagihan aktif berupa ST, SP, SPMP, Pemblokiran, Pencegahan dan Penyanderaan. Seksi Pelayanan berupa edukasi dan penyuluhan wajib pajak baru.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, secara umum tingkat capaian kinerja KPP Pratama Cileungsi pada Tahun 2024 berada dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan dan prestasi yang berhasil dicapai oleh KPP Pratama Cileungsi pada Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. 3 Besar Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) DJP Tahun 2023;
2. Terbaik II Kategori Desain Grafis Lokakarya Kreasi Konten Media Sosial Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2023;
3. 10 Besar KPP untuk Kriteria Pemanfaatan Aplikasi Studia sebagai Sarana Media Pembelajaran Tahun 2023;
4. Peringkat 3 Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik Tingkat KPP Tahun 2023;
5. Pengelola Facebook Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III;
6. Pengelola Instagram Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III;
7. Pengelola Medsos Terbaik Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III; dan
8. Pengelola Twitter Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Cibinong, 31 Januari 2025



Plt. Kepala Kantor,

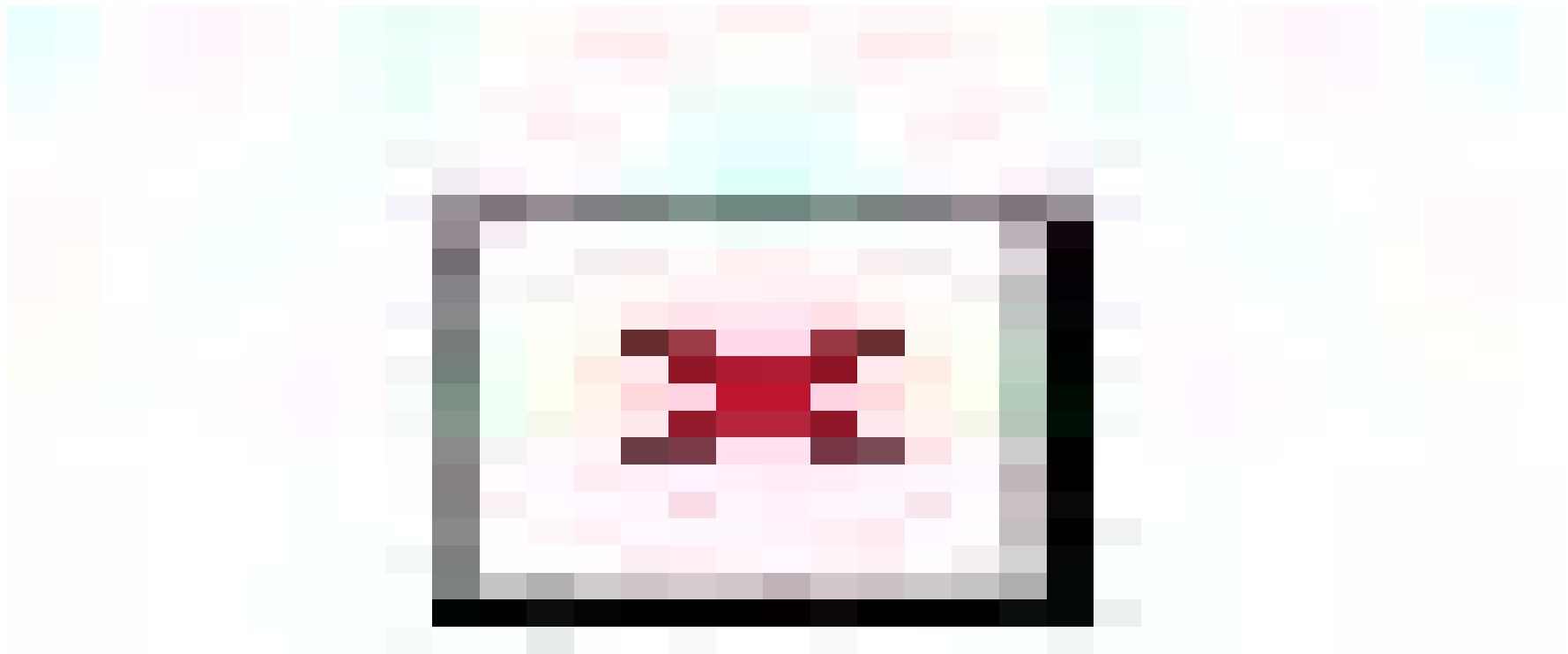


Ditandatangani secara elektronik
Budi Suroso

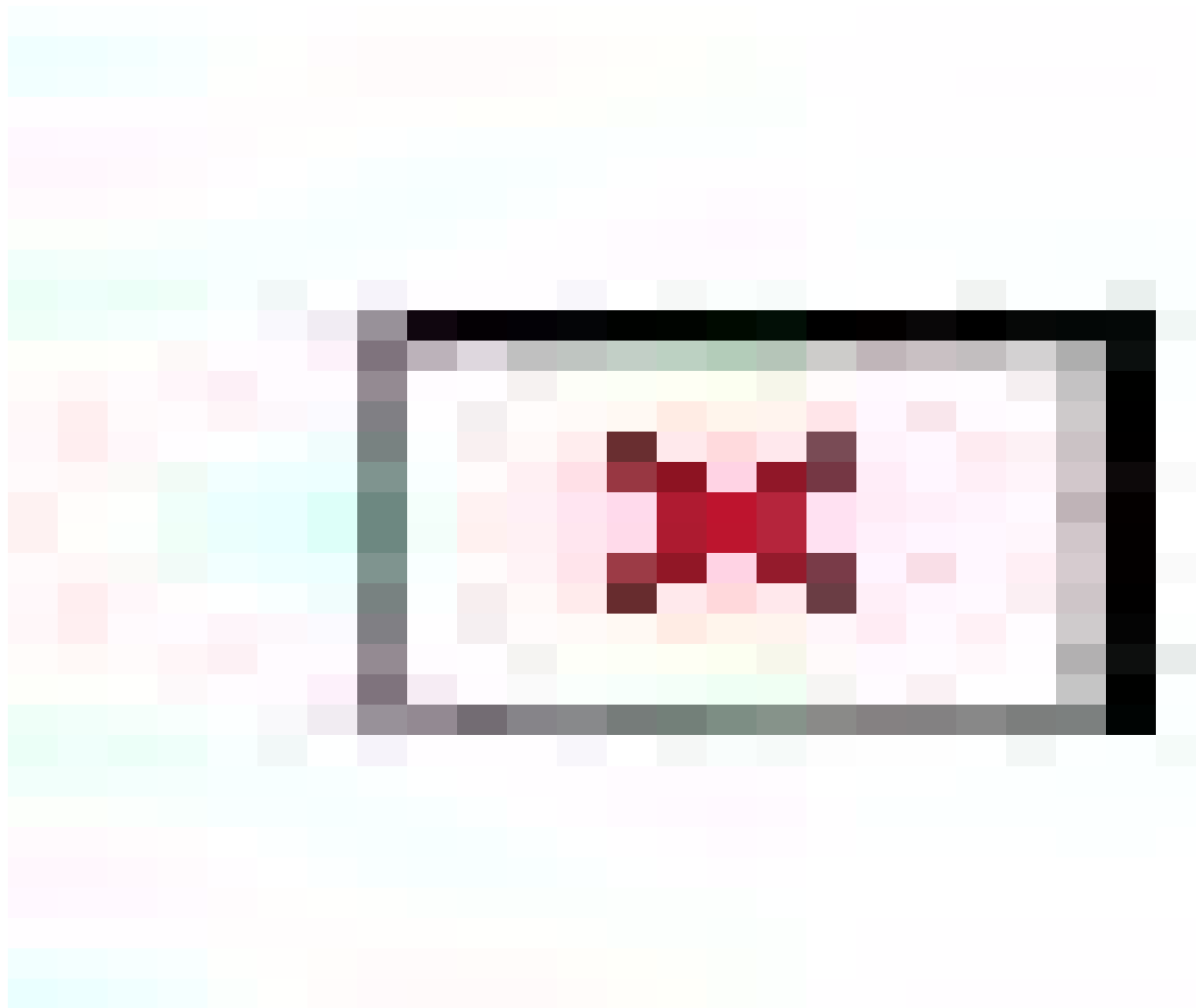
3 Besar Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) DJP Tahun 2023



Terbaik II Kategori Desain Grafis Lokakarya Kreasi Konten Media Sosial Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2023



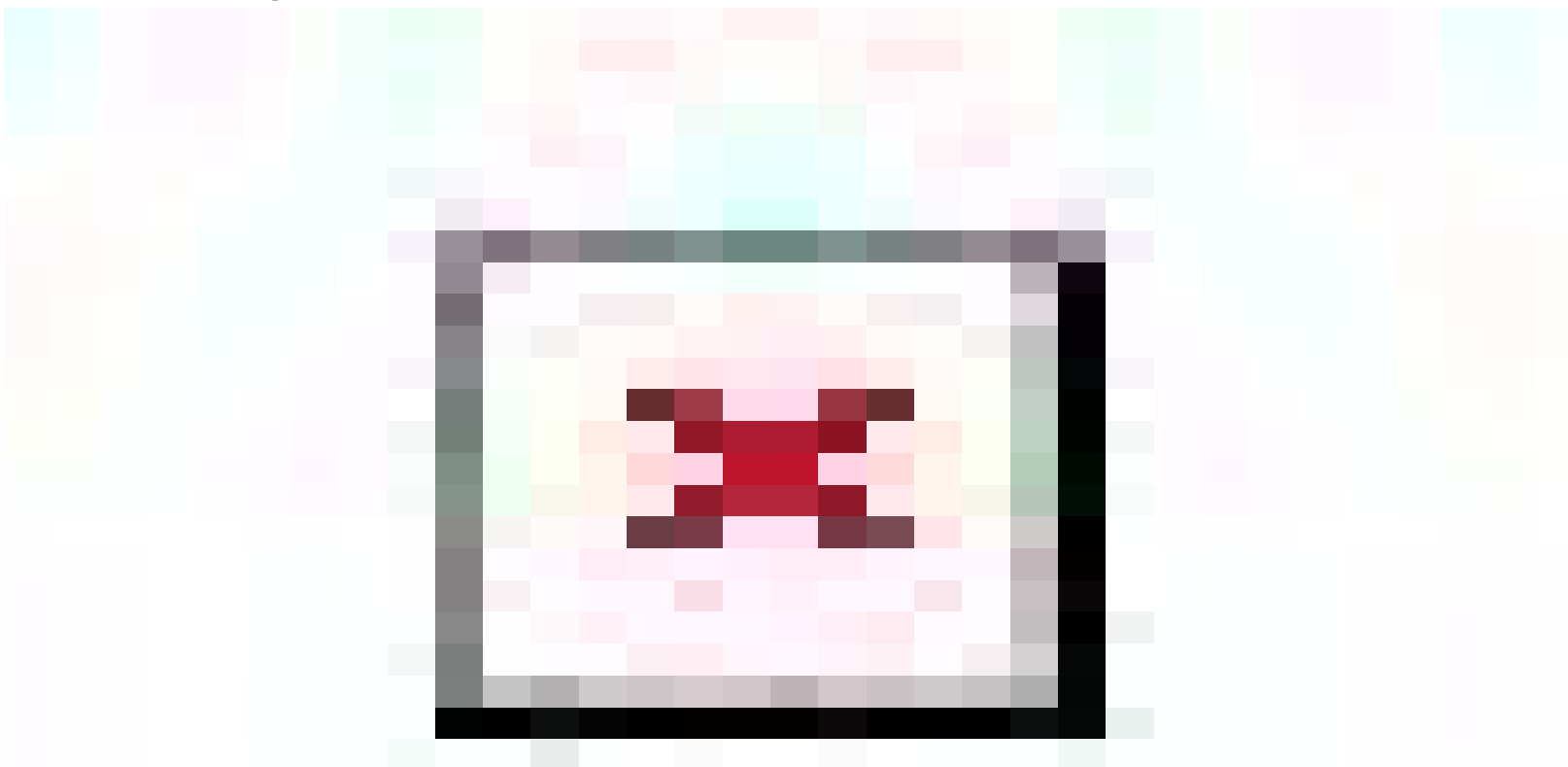
10 Besar KPP untuk Kriteria Pemanfaatan Aplikasi Studia sebagai Sarana Media Pembelajaran Tahun 2023



Peringkat 3 Tim Pengelola Jejaring Sosial Terbaik Tingkat KPP Tahun 2023



Pengelola Facebook Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III



Pengelola Instagram Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III



No. 39/WPJ.33/PGM/2023

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan bangga diberikan kepada

KPP PRATAMA CILEUNGSI

Sebagai **Pengelola Instagram Terbaik II** Sepanjang Tahun 2023
Tingkat Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III

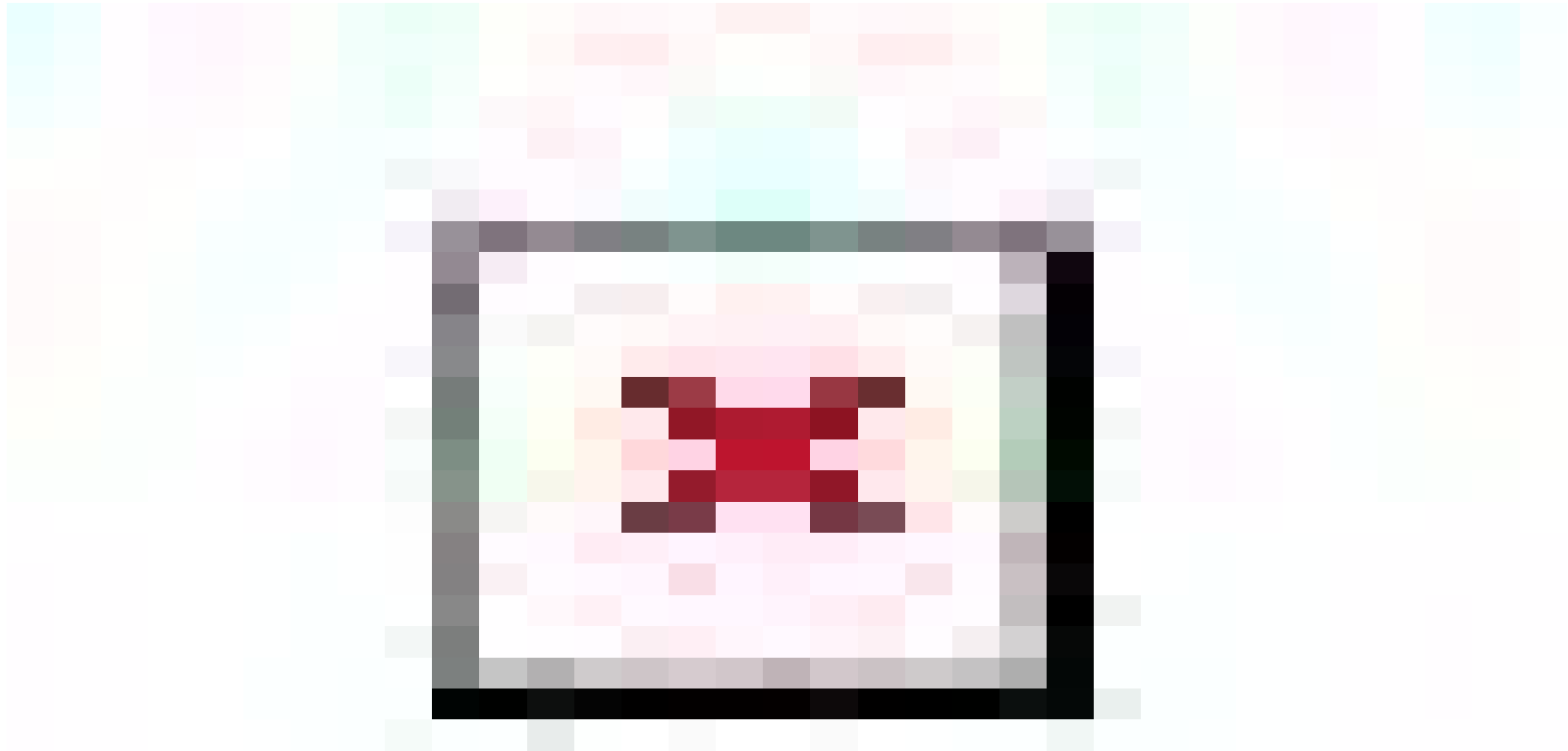
Bogor, 07 November 2023

Lucia Widiharsanti

Plh. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III



Pengelola Medsos Terbaik Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III



Pengelola Twitter Terbaik II Tahun 2023 Tk. Kanwil DJP Jabar III.

